

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dimaksudkan :

- a. menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- b. Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada tahun anggaran 2021, dalam rangka akuntabilitas, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan transparansi.

Adapun tujuan penyusunan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum

- a. UUD Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah pada Masa Transisi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

- Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

BAB VI Penutup

Bab ini memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan Keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp6.475.541.660,-. Besaran jumlah anggaran tersebut merupakan anggaran tahun kelima bagi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul karena tahun 2016 bagian ini belum ada.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 juga dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2021 merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui kas Bagian.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai bagian fungsi penunjang pelayanan pemerintah Kabupaten Bantul berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

- d. Tidak terjadinya temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2021 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatkan tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatkan fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian dan pengawasan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai bagian dari PD Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran pendapatan dan belanja di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2021 hanya mengelola belanja saja, yaitu Belanja Belanja Langsung.

Belanja Langsung yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun 2021 sebesar Rp6.475.514.660,- dengan realisasinya mencapai Rp6.248.957.490,-. Sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp226.557.170,-

Belanja langsung tersebut meliputi anggaran Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp49.680.000,- dengan realisasi mencapai Rp45.180.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp4.500.000,- dan Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp3.645.834.660,- realisasi mencapai Rp3.423.777.490,- sisa anggaran masih Rp222.057.170,- serta Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp2.780.000.000,- terealisasi sebesar Rp2.780.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp0,-

c. Pembiayaan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tidak mengelola pembiayaan.

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas

Kas di bendahara pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

Persediaan dicatat pada akhir tahun periodse akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi asset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Asset Tetap lainnya

Asset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila asset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

d. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, asset tetap lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

Ekuitas dana cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada asset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

e. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti standar akuntansi pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, pasal 274 ayat 3 Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud ayat 2 terdiri dari : (a) Laporan realisasi anggaran; (b) neraca; dan (c) catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pendapatan serta realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

Realisasi Belanja Daerah

Dari Rencana Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul yang tertuang dalam perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp6.475.514.660,-, realisasinya mencapai Rp6.248.957.490,-, dengan sisa anggaran sebesar Rp226.557.170,- dapat diperinci sebagai berikut:

Belanja Langsung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1. Belanja Pegawai	49.680.000	45.180.000	4.500.000
2. Belanja Barang dan Jasa	3.645.834.660	3.423.777.490	222.057.170
3. Belanja Hibah	2.780.000.000	2.780.000.000	0
Jumlah	6.475.514.660	6.248.957.490	226.557.170

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. Aset

a. Aset Lancar

	31 Des 2021	31 Des 2020
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2) Persediaan *)	1.412.600	367.000
Jumlah	1.412.600	367.000

*) Jumlah tersebut adalah persediaan barang pakai habis (alat Tulis kantor) yang masih tersisa per 31 Desember 2021.

b. Aset Tetap

	31 Des 2021	31 Des 2020
1) Tanah Kantor	0	0
2) Peralatan dan Mesin	1.937.980.135	1.937.980.135
3) Bangunan Gedung	7.267.623.000	7.267.623.000
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5) Aset tetap lainnya	0	0
Jumlah	9.205.603.135	9.205.603.135

5.2.2. Ekuitas Dana

	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
1) Ekuitas Dana Lancar	Rp1.412.600,-	Rp367.000,-

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek dengan perhitungan sebagai berikut :

- Cadangan Piutang	Rp0,-	Rp0,-
- SILPA/SILKA	Rp0,-	Rp0,-
- Cadangan persediaan	Rp1.412.600,-	Rp367.000,-
- Ekuitas Dana Lancar	Rp1.412.600,-	Rp367.000,-

	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
2) Ekuitas Dana Investasi	Rp9.205.603.135,-	Rp9.205.603.135,-

Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai investasi permanent, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang dengan perhitungan sebagai berikut :

- Diinvestasikan dalam asset lainnya	Rp0,-
--------------------------------------	-------

Jumlah Ekuitas Dana yg diinvestasikan	Rp0,-
---------------------------------------	-------

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB VI
PENUTUP**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

- Realisasi Belanja

Dari Rencana Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul yang tertuang dalam perubahan APBD tahun 2021 jumlah anggaran sebesar Rp6.475.514.660,- dengan tingkat realisasinya mencapai Rp6.248.957.490,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp226.557.170,- Adapun sisa anggaran sebesar tersebut disebabkan antara lain karena adanya rasio sumber daya manusia, alokasi waktu, sarana dan prasarana kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang harus dikelola dan sebagainya karena dilakukannya penghematan/efisiensi anggaran.

2. Neraca

a. Aset

Aset terdiri dari asset lancar dan asset tetap yang dimiliki Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 sebagai bagian dari OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang relative masih baru dan tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas. Adapun asset tetap Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun 2019 senilai Rp8.432.622.990,- terdiri dari distribusi dari Bidang Aset BKAD, pelimpahan dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul senilai Rp22.739.900,- berasal dari pengadaan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 sebesar Rp644.450.000,- pengadaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.040.345.440,- pelimpahan dari Masjid Agung Manunggal Bantul tahun 2018 sebesar Rp6.555.251.000,- dan pengadaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 sebesar Rp216.036.650,- serta penghapusan pada gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp46.200.000,-, dan pengadaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.616.395,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

Asset yang diperoleh dari pemberian/distribusi Bidang Aset BKAD Kabupaten

Bantul berupa :

- 3 buah printer Laserjet Pro M201n
- 3 unit CPU/Komputer
- 7 buah meja kerja kayu ½ biro
- 7 buah kursi kerja
- 1 buah Almari
- 1 unit AC 2 pk
- 1 unit Sepeda Motor dinas Honda Vario
- 1 unit Mobil dinas Toyota Avansa

Asset pemberian/penyerahan dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

berupa :

- 2 buah meja kerja

Asset yang diperoleh dari pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 adalah :

- 1 buah meja rapat
- 6 buah kursi rapat
- 5 buah meja kerja
- 5 buah kursi kerja
- 4 unit AC
- 1 buah Camera tangan
- 1 buah LCD Projector
- 1 set Wireless
- 2 unit sepeda motor dinas Yamaha Soul
- 1 buah Laptop
- 3 unit computer Lenovo
- 2 buah printer

Asset yang diperoleh dari pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 adalah :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

- 1 buah meja kerja ½ biro
- 27 buah kursi rapat
- 6 buah meja rapat
- 1 buah lemari kerja
- 3 buah filling kabinet
- 1 buah kerja kayu ukir
- 1 buah rak arsip
- 1 unit computer Lenovo
- 5 buah printer
- 5 buah UPS
- 1 buah kamera
- 1 buah Televisi
- 1 buah screen proyektor
- 2 buah Laptop
- 3 unit sepeda motor dinas

Asset pelimpahan dari Masjid Agung Manunggal Bantul adalah terdiri dari Bangunan Masjid Agung beserta peralatan yang ada di dalamnya.

Asset yang diperoleh dari pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2019 adalah :

- 1 Filling Kabinet Besi
- 2 Lemari besi
- 1 Meubelair
- 1 Lemari kayu
- 1 Alat kantor lainnya
- 1 Multi Purpose Vehicle
- 1 Laptop
- 2 Printer Brother

Asset yang diperoleh dari pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 adalah :

- 1 Personal Computer dan 1 Laptop.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tahun Anggaran 2021 di Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak ada penambahan asset tetap.

b. Ekuitas Dana

Ekuitas dana lancar Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.412.600,- yang merupakan selisih dari aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.

Demikian laporan keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul , 10 Januari 2022

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Drs. Edy Bowo Nurcahyo, M.A.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.196404241991031003